
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 4 NO 1
JANUARI 2018

Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com

PENGARUH REALISASI BELANJA MODAL TERHADAP BELANJA DAERAH DI KECAMATAN SUKASARI BANDUNG PERIODE 2011 - 2016

Hani Hatimatunnisani & Alen Dereas Putri

ABSTRACT

The study aimed to know the influence of realization capital expenditure to regional expenditure at Kecamatan Sukasari Bandung. The research method used a quantitative approach method. Data was analysed using simple linear regression models and t-test was employed to test the hypothesis with 5% level of significant.

The results of the data showed that relationship realization capital expenditure and regional expenditure at Kecamatan Sukasari Bandung of 0,869 which means very strong with a coefficient of determination of 75,6% showed the influence of capital expenditure to regional expenditure and the remaining 24,4% is influenced by other factors.

The problem that arise was that the late implementation of budget documents implementation of the regional work unit (DPA SKPD) and document implementation of budget changes (DPAP) on stucking on the process of activities to realize capital expenditure. The suggests given to the sub-district to have the attitude and a swift movement to provide intensive warning to the city government Bandung, and so also for the Bandung city government to quickly respond to warnings provided by the sub-district to accelerate the determination of DPA SKPD and DPAP for activities immediately realized.

Keywords : Realization Capital Expenditure, Regional Expenditure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan belanja bagi pemerintah daerah disamping sumber - sumber pendapatan yang lain. Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai sumber utama yang membiayai belanja daerah karena jumlahnya yang signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah memegang peranan yang sangat vital dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah daerah memiliki kebebasan yang penuh dalam menentukan prioritas belanja yang dianggap penting oleh daerah. Sehingga dengan demikian merupakan suatu hal yang biasa apabila prioritas belanja antara suatu daerah dengan daerah yang lain berbeda satu sama lainnya. Prioritas belanja daerah akan sangat dipengaruhi oleh rencana strategis pemerintah daerah, salah satunya realisasi belanja modal pemerintah daerah. Rencana strategis pemerintah daerah merupakan gambaran apa yang diinginkan pemerintah daerah atau kota di masa yang akan datang atas aset atau kekayaan daerah yang manfaatnya akan dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh aparatur dan masyarakat, dan realisasi belanja modal merupakan upaya atau tindakan mewujudkan pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi dalam rangka pembentukan modal yang ada yang akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu, sehingga rencana strategis pemerintah daerah dan realisasi belanja modal memegang peranan dalam menentukan struktur dan arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagai Implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Dan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang salah satu isinya meliputi Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Catatan Atas Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kecamatan Sukasari Tahun 2011 Sampai Dengan 2016.

Kecamatan Sukasari Bandung yang merupakan salah satu bagian eks wilayah Bojonegara dengan luas tanah 627,5 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 67.904 jiwa. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Sukasari Bandung guna mengetahui bagaimana pengaruh realisasi belanja modal terhadap belanja daerah.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai Penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar realisasi belanja modal mempengaruhi belanja daerah pada Kecamatan Sukasari Bandung periode tahun 2011-2016

LANDASAN TEORI

Kebijakan Akuntansi Belanja

Kebijakan akuntansi belanja berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Bandung menjelaskan bahwa:

- a. Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran atau penilaian dan pertanggungjawaban;
- b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Kota Bandung atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi;

- c. Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi pemerintah Kota Bandung;
- d. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan;
- e. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan;
- f. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan;
- g. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
- h. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- i. Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan atau hak kepemilikannya telah berpindah;
- j. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya);
- k. Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs BI pada saat terjadinya belanja.

Definisi Belanja Modal

Definisi belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 “Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset”.

“Belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang nantinya dapat menambah kekayaan pemerintah dan dapat dirasakan manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran”. (Mardiasmo, 2009:67).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menambah asset tetap pemerintahan yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi.

Kriteria Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai

belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi asset tetap atau asset lainnya dan kriteria kapitalisasi asset tetap.

- a. Asset tetap mempunyai ciri – ciri atau karakteristik sebagai berikut : (1) Berwujud; (2) Menambah asset pemerintah; (3) Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; dan (4) Nilainya relatif material.
- b. Asset lainnya mempunyai ciri – ciri atau karakteristik sebagai berikut : (1) Tidak berwujud; (2) Menambah asset pemerintahan; (3) Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; dan (4) Nilainya relatif material.
- c. Kapitalisasi asset tetap
Untuk kriteria kapitalisasi asset tetap, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu asset tetap atau asset lainnya (*threshold capitalization*), sehingga pejabat atau aparat penyusun anggaran dan atau penyusun anggaran dan atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah.

Jenis Belanja Modal

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, belanja modal terdiri dari 5 (lima) jenis belanja modal yang dikategorikan utama, diantaranya adalah :

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Kategori Belanja Modal

Menurut Ghazali (2008:57) suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.

Definisi Belanja Daerah

Belanja daerah menurut IASC Framework (Halim, 2002:73) “Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deflasi asset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”.

Sedangkan menurut Undang - Undang No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Definisi belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, “Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas

dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Definisi belanja daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, “Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara atau daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

“Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja”. (Peraturan Walikota Bandung, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2011:42).

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang - undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Kelompok Belanja Daerah

Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 belanja dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung ;

a. Kelompok Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja, terdiri dari : (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Bunga; (3) Belanja Subsidi; (4) Belanja Hibah; (5) Belanja Bantuan Sosial; (6) Belanja Bagi Hasil; (7) Belanja Bantuan Keuangan; dan (8) Belanja Tidak Terduga.

b. Kelompok Belanja Langsung

Belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja, terdiri dari : (1) Belanja Hibah; (2) Belanja Bantuan Sosial; (3) Belanja Pegawai; (4) Belanja Barang dan Jasa; dan (5) Belanja Modal.

Jenis Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 secara umum belanja daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :

- a. belanja administrasi umum,
- b. belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik,
- c. belanja modal,

- d. belanja transfer, dan
- e. belanja tak terduga.

Klasifikasi Belanja Daerah

Menurut Nurlan Darise (2008:138) belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Fungsi
Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi - fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintah yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan kota.
- b. Organisasi
Yang dimaksud dengan klasifikasi belanja menurut organisasi pemerintahan daerah seperti kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan lembaga teknik daerah, kecamatan dan kelurahan.
- c. Program dan Kegiatan
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan organisasi pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:3), menjelaskan metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri - ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara - cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara - cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara - cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah - langkah tertentu yang bersifat logis.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang menganalisis data dalam bentuk angka dan perhitungan dengan menggunakan metode statistik, sehingga memudahkan penafsiran data mentah yang diperoleh. (Sugiyono, 2009:15)

Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel adalah definisi yang menjadikan variabel - variabel yang diteliti menjadi operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel - variabel tersebut. Tujuan dilakukannya deskripsi variabel operasional adalah untuk menjelaskan makna variabel penelitian. Setiap variabel diukur berdasarkan indikator variabel. Variabel adalah gejala yang tampak dan dapat diamati untuk menunjukkan bahwa variabel itu terjadi. Hal ini dibuat agar dalam teori dan prakteknya maka dari setiap variabel saling berhubungan sehingga keterikatan isi laporan menjadi lebih jelas.

Menurut hubungan satu variabel dengan variabel yang lain maka macam - macam variabel dalam penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut (Sugiyono, 2015:64)

- a. Variabel Independen, variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Disebut juga variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu Realisasi Belanja Modal (variabel X).
- b. Variabel Dependen, variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Disebut juga variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini yang menjadi variabel terikat yaitu Belanja Daerah (variabel Y). skala pengukuran (Sugiyono, 2012:92) yang digunakan adalah skala rasio.

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio, dimana skala ini adalah skala interval yang benar - benar memiliki nilai nol mutlak. Dengan demikian skala rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat.

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:119), Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan keuangan Kecamatan Sukasari Bandung.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun cara dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*, yakni suatu teknik pengambilan data sampel yang didasarkan oleh pertimbangan tertentu, yaitu keterbatasan waktu dan data penelitian sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Menurut Sugiyono (2012:126) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Dalam hal ini pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan data penelitian di Kecamatan Sukasari Bandung. Sehingga sampel yang diambil adalah laporan realisasi belanja modal dan belanja daerah selama 6 (enam) tahun, yakni periode 2011 - 2016.

PEMBAHASAN

Perkembangan Realisasi Belanja Modal Di kecamatan Sukasari Bandung

Berikut adalah Realisasi Belanja Modal di Kecamatan Sukasari Bandung selama 6 tahun.

Tabel 1.
Realisasi Belanja Modal di Kecamatan Sukasari Bandung
Periode 2011 – 2016

Tahun	Belanja Modal	Selisih	%	Ket
2011	3,021,961,900	-	-	-
2012	3,415,114,802	393,152,902	13	Naik

2013	2,966,507,579	(448,607,223)	(13)	Turun
2014	3,301,535,760	335,028,181	11	Naik
2015	2,293,646,660	(1,007,889,100)	(31)	Turun
2016	1,800,131,650	(493,515,010)	(22)	Turun
Jumlah	16,798,898,351	-	-	-
Rata-rata	2,799,816,392	-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari, diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa belanja modal tertinggi sebesar Rp.3,415,114,802 atau mengalami kenaikan sebesar 13% terjadi pada tahun 2012, sedangkan terendah sebesar Rp.1,800,131,650 atau mengalami penurunan sebesar 22% terjadi pada tahun 2016, dengan total belanja modal selama 6 tahun sebesar Rp.16,798,898,351 dengan rata – rata sebesar Rp.2,799,816,392 pertahun.

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Di Kecamatan Sukasari Bandung

Berikut adalah data mengenai Realisasi Belanja Daerah di Kecamatan Sukasari Bandung selama 6 tahun.

Tabel 2
Realisasi Belanja Daerah di Kecamatan Sukasari Bandung
Periode 2011 – 2016

Tahun	Belanja Daerah	Selisih	%	Ket
2011	11,424,252,321	-	-	-
2012	9,717,579,622	(1,706,672,699)	(15)	Turun
2013	8,516,608,704	(1,200,970,918)	(12)	Turun
2014	12,243,518,700	3,726,909,996	44	Naik
2015	15,310,601,615	3,067,082,915	25	Naik
2016	18,009,601,639	2,699,000,024	18	Naik
Jumlah	75,222,162,601	-	-	-
Rata- rata	12,537,027,100	-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari, diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa belanja daerah tertinggi sebesar Rp.18,009,601,639 atau mengalami kenaikan sebesar 18% terjadi pada tahun 2016, sedangkan terendah sebesar Rp.8,516,608,704 atau mengalami penurunan sebesar 12% terjadi pada tahun 2013, dengan total belanja daerah selama 6 tahun sebesar Rp.75,222,162,601 dengan rata – rata sebesar Rp.12,537,027,100 pertahun.

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dimaksud untuk mengetahui apakah sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah uji *Kolmogorov Smirnov* dengan SPSS 20.

Tabel 3.
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	<i>Belanja Modal</i>	<i>Belanja Daerah</i>	<i>Standardized Residual</i>
<i>N</i>	6	6	6
<i>Normal Mean</i>	2799816391,83	12537027100,16	0E-7
<i>Parameters^{a,B} Std.</i>	626582223,990	3551879804,410	,89442719
<i>Deviation</i>	35	99	
<i>Most Extreme Absolute</i>	,272	,200	,329
<i>Differences Positive</i>	,163	,200	,211
<i>Negative</i>	-,272	-,129	-,329
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	,665	,489	,806
<i>Asymp. Sig. (2-Tailed)</i>	,768	,971	,534

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS, data diolah oleh Penulis (2018)

Dengan kriteria pengujian adalah H_0 ditolak jika nilai *Asymp-Sig (2-tailed)* < 0,05 yang artinya data tidak berdistribusi normal, dan H_0 diterima jika nilai *Asymp-Sig (2-tailed)* > 0,05 yang artinya data berdistribusi normal.

Berdasarkan Tabel 3. dapat diketahui bahwa nilai *Asymp-Sig. (2-tailed)* untuk Realisasi Belanja Modal sebesar 0,768, Belanja Daerah sebesar 0,971, karena nilai *Asymp-Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka H_0 diterima artinya sampel Realisasi Belanja Modal dan Belanja Daerah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Begitupun juga dengan nilai residual diperoleh *Asymp-Sig* sebesar 0,534, ini berarti bahwa residu dari regresi juga berdistribusi normal.

Analisis Korelasi *Pearson Product Moment* (PPM)

Koefisien korelasi *Pearson Product Moment* dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai derajat atau keeratan hubungan linier antara dua variabel dan menunjukkan arah hubungan antara dua variabel. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 20, maka diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.
Koefisien Korelasi *Pearson Product Moment*
Correlations

		<i>Belanja Modal</i>	<i>Belanja Daerah</i>
<i>Belanja Modal</i>	<i>Pearson Correlation</i>	1	,869*
	<i>Sig. (2-Tailed)</i>		0,024
	<i>N</i>	6	6
<i>Belanja Daerah</i>	<i>Pearson Correlation</i>	,869*	1
	<i>Sig. (2-Tailed)</i>	0,024	
	<i>N</i>	6	6

*. *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*

Sumber : Output SPSS, data diolah oleh Penulis (2018)

Dari Tabel 4. di atas dapat dilihat Koefisien Korelasi *Pearson Product Moment* antara realisasi belanja modal terhadap belanja daerah menunjukkan angka sebesar 0,869. Artinya hubungan antara Realisasi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah sebesar 0,869, hubungan ini termasuk dalam kategori sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan tersebut searah. Artinya jika Realisasi Belanja Modal meningkat maka Belanja Daerah juga akan meningkat.

Untuk melihat hubungan antara variabel Realisasi Belanja Modal dan Belanja Daerah signifikan atau tidak, dapat dilihat dari angka probabilitas (*Sig*) sebesar 0,024 yang lebih kecil dari pada 0,05. Ketentuan menyatakan jika angka probabilitas < 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Jika angka probabilitas > 0,05 maka hubungan antara kedua variabel tersebut tidak signifikan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Realisasi Belanja Modal dan Belanja Daerah di Kecamatan Sukasari Bandung.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah analisis yang menerangkan pola hubungan antara satu variabel X dengan variabel Y. Untuk mengetahui nilai dari persamaan regresi, maka Penulis melakukan pengelolaan data analisis regresi linier sederhana menggunakan SPSS 20.

Tabel 5.
Analisis Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>(Constant)</i>	26335065952,545	4002382441,849		6,580	,003
<i>Belanja Modal</i>	4,928	1,401	,869	3,519	,024

A. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Output SPSS, data diolah oleh Penulis (2018)

Berdasarkan Tabel 5. Diperoleh persamaan regresi yaitu:

$$Y = 26.335.065.952,545 + 4,928X$$

Dari persamaan di atas dapat diartikan nilai konstanta Rp.26.335.065.952,545,- menyatakan bahwa jika Realisasi Belanja Modal (X) bernilai 0, maka besarnya Belanja Daerah adalah Rp.26.335.065.952,545,- Sedangkan koefisien regresi sebesar 4,928 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp.1,- Realisasi Belanja Modal akan menambah Belanja Daerah sebesar Rp.4,928.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan sebagai upaya untuk melihat besarnya pengaruh atau sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (R^2). Adapun nilai koefisien determinasi antara Realisasi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah dapat dilihat sebagai berikut ;

Tabel 6.
Koefisien Determinasi
Model Summary

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,869 ^a	,756	,695	1962335086,37597

a. Predictors: (Constant), belanja modal

Sumber : Output SPSS, data diolah oleh Penulis (2018)

Nilai koefisien determinasi (R^2 atau R square) sebesar 0,756 atau 75,6%. Hal ini menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Modal berpengaruh terhadap Belanja Daerah sebesar 75,6% dan sisanya 24,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan mengenai pengaruh Realisasi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah di Kecamatan Sukasari Bandung selama 6 tahun (2011 – 2016), maka Peneliti memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Belanja Modal tertinggi sebesar Rp.3,415,114,802 atau mengalami kenaikan sebesar 13% terjadi pada tahun 2012, sedangkan terendah sebesar Rp.1,800,131,650 atau mengalami penurunan sebesar 22% terjadi pada tahun 2016, dengan total belanja modal selama 6 tahun sebesar Rp.16,798,898,351 dengan rata - rata sebesar Rp.2,799,816,392 pertahun.
- Belanja Daerah tertinggi sebesar Rp.18,009,601,639 atau mengalami kenaikan sebesar 18% terjadi pada tahun 2016, sedangkan terendah sebesar Rp.8,516,608,704 atau mengalami penurunan sebesar 12% terjadi pada tahun 2013, dengan total belanja daerah selama 6 tahun sebesar Rp.75,222,162,601 dengan rata - rata sebesar Rp.12,537,027,100 pertahun.

- c. Hubungan Realisasi Belanja Modal dengan Belanja Daerah sangat kuat dengan diperolehnya korelasi sebesar 0,869, sedangkan Koefisien Determinasi sebesar 75,6% menunjukkan besar pengaruh belanja modal terhadap belanja daerah dan sisanya 24,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
- d. Sehubungan dengan data yang diperoleh, dalam proses belanja daerah mengalami hambatan dalam merealisasikan belanja modal dikarenakan terlambatnya penetapan DPA SKPD, DPAP dan system, prosedur keuangan belum seluruhnya dapat mengakomodir kebutuhan SKPD, sehingga perlu diantisipasi dengan meminta pihak Pemerintah Kota Bandung yang diharapkan dapat mempercepat penetapan DPA dan DPAP SKPD sehingga kegiatan dapat segera terealisasikan.

Saran

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dalam penelitian mengenai Pengaruh Realisasi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah di Kecamatan Sukasari Bandung, maka Peneliti mencoba memberikan masukan berupa saran yang diharapkan bermanfaat bagi Kecamatan Sukasari Bandung, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebaiknya kepada pihak kecamatan untuk memiliki sikap dan gerak yang sigap untuk memberikan peringatan yang intensif kepada Pemerintah Kota Bandung, dan begitu pula untuk pihak Pemerintah Kota Bandung untuk cepat tanggap terhadap peringatan yang diberikan oleh pihak kecamatan untuk mempercepat penetapan DPA SKPD dan DPAP agar kegiatan segera terealisasikan.
- b. Mengadakan pelatihan mengenai penatausahaan atau pengelolaan keuangan, teknis pengadaan barang jasa, pengelolaan asset daerah maupun pelaporan keuangan terhadap pegawai agar pegawai update terhadap sistem, prosedur yang ada di dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Sukasari Bandung dan memperkecil resiko kesalahan dalam menjalankan sistem, prosedur pengelolaan keuangan.
- c. Sebaiknya bagian yang berwenang dalam memberikan informasi, agar segera mensosialisasikan mengenai kejelasan aturan dan kebijakan dalam penyerapan anggaran kegiatan sesuai aturan yang berlaku agar seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung No. 542 Tahun 2008 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Walikota Bandung No. 1053 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari Bandung Tahun 2011

Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari Bandung Tahun 2012

Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari Bandung Tahun 2013

Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari Bandung Tahun 2014

Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari Bandung Tahun 2015
Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari Bandung Tahun 2016

Buku – Buku Ilmiah

Ali, Hasan. Marketing. (2008). Media Pressindo: Yogyakarta.

Darise, Nurlan. Akuntansi Keuangan Daerah. (2008). PT.Indeks: Jakarta.

Halim, Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah. (2002). Salemba Empat: Jakarta.

Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. (2009). Andi: Yogyakarta.

Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. (2006). Graha Ilmu: Yogyakarta.

Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. (2009). Alfabeta: Bandung.

Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R & D). (2010). Alfabeta: Bandung.

Metode Penelitian Pendidikan. (2011). Alfabeta: Bandung.

Metode Penelitian Bisnis. (2012). Alfabeta: Bandung.

Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (2014). Alfabeta: Bandung.

Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). (2015). Alfabeta: Bandung.